

Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Melalui Program Kredit Usaha Rakyat BRI Situbondo

Nurul Azizah, Mohammad Armoyu

Fak. Dakwah Universitas Ibrahimy Situbondo

nurul.azizah74@gmail.com m.armoyu@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini mengkaji tentang pemberdayaan masyarakat miskin melalui kredit usaha rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia kantor Cabang Situbondo Jawa Timur. Beberapa permasalahan pada penelitian ini adalah Bagaimanakah program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia Cabang Situbondo dapat mewujudkan pemberdayaan masyarakat miskin Dan Bagaimanakah Bank Rakyat Indonesia Kantor cabang Situbondo dalam mengimplementasikan program Kredit Usaha Rakyat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif konstruktif. Simpulan hasil penelitian ini bahwa program Kredit Usaha Rakyat Bank Rakyat Indonesia di Kabupaten Situbondo Jawa Timur dapat mewujudkan pemberdayaan masyarakat miskin. Rekomendasi yang ditawarkan adalah Pembinaan dan pendampingan BRI Cabang Situbondo terhadap pemberdayaan masyarakat miskin melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) di kabupaten Situbondo. Salah satu tugas pokok Bank disamping menyalurkan kredit, juga sebagai fasilitator, motivator dan melakukan pembinaan terhadap Debitur. Kepada interen manajemen Bank Rakyat Indonesia. Untuk Mempertimbangkan kebijakan yang telah dilakukan selama ini agar ditinjau ulang, menyeimbangkan target yang harus dicapai dengan kemampuan pekerja dalam mengelola acount. Sehingga mempunyai waktu untuk melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap para debitur, diharapkan usaha debitur lebih berkembang dengan menanamkan jiwa entrepreneurship sehingga kualitas kreditnya juga menjadi sehat.

Kata Kunci: pemberdayaan, masyarakat miskin, kredit usaha rakyat (kur)



A. Pendahuluan

Kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diatasi bersama dalam kehidupan masyarakat. pemerintah telah melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan selama tiga dasawarsa upaya penanggulangan kemiskinan memerlukan strategi yang menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan antara lain dengan melibatkan seluruh masyarakat termasuk dunia usaha dan kalangan swasta lainnya. Intinya, keterlibatan, komitmen dan kerjasama semua pihak sangat diperlukan karena penanggulangan kemiskinan merupakan tanggungjawab kita bersama.

Kemiskinan adalah persoalan klasik bagi bangsa Indonesia sejak berdiri. Hampir semua orde baik orde lama, orde baru, masa reformasi hingga saat ini. Pemerintah menjadikan kemiskinan sebagai prioritas program untuk ditanggulangi kemiskinan dapat menyesatkan bila dipahami secara sempit sebagai suatu realitas atau keadaan objektif, mandiri, dan dapat dihitung dengan angka, sebab kemiskinan tidak dapat hanya diukur dengan indikator penguasaan atau pemilikan materi. Istilah kemiskinan selalu melekat dan begitu populer pada masyarakat yang sedang berkembang. Istilah yang sangat mudah diucapkan tetapi tidak mudah untuk menentukan yang miskin itu bagaimana, siapa yang tergolong penduduk miskin.

Upaya penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah difokuskan pada berbagai kebijakan dan program penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, perluasan kesempatan kerja, sarana dan prasarana pertanian dan nelayan, kredit usaha bagi masyarakat miskin serta prasarana pemukiman kumuh perkotaan.

Program penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran oleh pemerintah di kelompokkan dalam empat kelompok program. *Pertama*, bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, *kedua* penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat atau PNPM Mandiri, *ketiga* penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil serta yang keempat sebagai kelompok terakhir adalah program kredit usaha rakyat (KUR).

Kabupaten Situbondo adalah salah satu kabupaten di Jawa Timur yang merupakan daerah miskin dan tertinggal di Jawa Timur. Beberapa hal yang mendasari mengapa peneliti memilih BRI Cabang Situbondo selaku lembaga perbankan yang menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) sebagai pertimbangan dan alasan menarik menjadi lokasi penelitian.

Alasan utama yang mendasari adalah pemerintah memberikan pengumuman setiap 5 tahun sekali pemerintah daerah-daerah tertinggal di Indonesia. Diperiode

2011–2015 Situbondo masuk kategori daerah tertinggal dan di Jawa Timur ada 5 daerah tertinggal yakni Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Pamekasan.

Kemiskinan di Situbondo merupakan salah satu permasalahan pembangunan yang kompleks dan multi dimensional. Pemerintah mempunyai program pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR), BRI Cabang Situbondo sebagai salah satu Bank pemerintah yang bertugas menyalurkan Kredit Usaha Rakyat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat miskin lebih mendalam khususnya yang terjadi Kabupaten Situbondo Propinsi Jawa Timur. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, selanjutnya dirumuskan permasalahan sebagai berikut : (1) Bagaimanakah program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia Cabang Situbondo dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat miskin? (2) Bagaimanakah Bank Rakyat Indonesia Kantor cabang Situbondo Melakukan pembinaan dan pendampingan Terhadap Nasabah Penerima Kredit KUR?

Ciri paling penting arsitektur ekonomi global baru ini akan melengkapi kerangka kerja teoritis kapitalisme yang baru setengah jalan dengan menyertakan sebuah tipe bisnis kedua, bisnis social di pasar global. Begitu bisnis social menjadi unsure yang diakui dalam kerangka kerja, ia dapat memainkan peran yang sangat penting dalam memecahkan krisis keuangan, krisis pangan, dan krisis lingkungan. Selain itu bisnis social dapat menyediakan mekanisme kelembagaan yang paling efektif untuk memecahkan masalah kemiskinan, tempat tinggal yang layak, kelaparan dan kesehatan. Bisnis social dapat mengatasi semua masalah yang ditinggalkan oleh bisnis berorientasi laba dan bersamaan dengan itu dapat mengurangi eksese dari bisnis-bisnis yang berorientasi laba.

Arsitektur ekonomi baru yang diusulkan Moh. Yunus tidak akan memutar mundur jarum jam pada globalisasi. Ia akan mendukung dan menyempurnakan globalisasi dengan memastikan bahwa pengaruhnya baik bagi warga miskin dan bagi Negara-negara miskin dengan memasukkan bisnis social ke dalam kerangka kerja global. Globalisasi dapat menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat untuk kebaikan, kekuatan yang dapat memberikan manfaat lebih banyak kepada kaum miskin lebih daripada kekuatan lain.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program yang termasuk dalam Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil (klaster 3). Klaster ini bertujuan untuk meningkatkan akses permodalan dan sumber daya lainnya bagi usaha mikro dan kecil.

B. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Program Penanggulangan Kemiskinan



Penyaluran kredit Usaha Rakyat di Situbondo cukup besar, sehingga diharapkan dengan penyaluran kredit tersebut bisa berdampak terhadap berkurangnya angka kemiskinan di Kabupaten Situbondo dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara makro dan merata. Dibawah ini adalah macam-macam Kredit Usaha Rakyat yang dikucurkan oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Situbondo

Bank Rakyat Indonesia Cabang Situbondo beralamat di jalan Ahmad Yani No 123 Kabupaten Situbondo Propinsi Jawa Timur, kode bank 0090, no telepon 0338-674111, 0338-61279, 0338-675273. No Fax 0338-63356. Internet banking <https://ib.bri.co.id>. Call Center Call BRI 14017 atau 021-57987400,500017. Berada ditengah jantung kota yang memiliki empat belas (14) BRI Unit yang tersebar dari ujung barat sampai ujung timur batas kabupaten Situbondo. Jumlah karyawan 229 terdiri dari karyawan kantor cabang, BRI Unit, Koperasi, PKSS, cleaning cervis, penjaga malam.

Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Situbondo telah melaksanakan Pemberdayaan masyarakat miskin melalui program KUR pada tahun 2014 sebesar Rp.98,2 Milyard terdiri dari 11.490 debitur dan pada tahun 2015 sebesar Rp. 95,7 Milyard yang terdiri dari 6.239 debitur. Baik diperkotaan hingga pedesaan. Seperti terlihat pada tabel jumlah debitur atau nasabah KUR pada tabel dibawah ini;

Tabel 4.1. Daftar Jumlah Debitur KUR di BRI

Daftar Jumlah Debitur

NO	NAMA UNIT	(000)							
		TAHUN				V MANTRI			
		2014		2015		KUR	NPL 2015		
		RP	ORANG	RP	ORANG		RP	%	ORG
1	SITUBONDO 1	7.479.374	1.178	5.968.739	680	3	51.425	0,86	19
2	PANJI	4.416.187	573	3.613.007	314	1	45.251	1,25	34
3	MANGARAN	2.215.404	360	2.653.057	345	1	43.575	1,64	18
4	KAPONGAN	4.985.026	607	3.994.720	355	2	64.255	1,61	27
5	JANGKAR	3.992.988	460	3.791.138	315	1	45.247	1,19	31
6	ASEMBAGUS	7.467.548	826	5.416.816	395	3	65.475	1,21	47
7	BANYUPUTIH	5.082.122	640	4.780.701	477	3	12.250	0,26	16
8	PANARUKAN	4.463.112	692	3.563.987	276	2	9.425	0,26	19
9	SUMBERKOLAK	5.961.043	883	4.903.591	464	3	12.452	0,25	21
10	MLANDINGAN	4.046.400	524	3.462.684	298	1	42.500	1,23	35
11	SUBOH	7.528.756	1.176	5.950.025	504	5	64.725	1,09	46
12	BESUKI 1	7.151.329	1.002	4.812.728	448	4	19.852	0,41	27
13	BESUKI 2	8.025.370	1.149	7.381.523	479	4	9.242	0,13	11
14	SITUBONDO 2	8.204.216	1.122	6.965.226	587	3	6.624	0,10	15
15	CABANG SITUBO	17.250.450	298	28.475.250	302	3	125.250	0,44	6
	JUMLAH	98.269.325	11.490	95.733.192	6.239	39	617.548	0,65	372

Sumber :Bagian Administrasi Kredit (ADK) BRI Cabang Situbondo, Januari 2017.

Hal ini seperti yang diutarakan oleh Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Cabang Situbondo yang bernama Susilo Wibowo bahwa:

“ Bank BRI adalah Salah Satu Bank pemerintah yang mempunyai tugas membantu pemerintah dalam mengembangkan perekonomian Indonesia, untuk Situbondo menurut data masih banyak masyarakat yang masih hidup dibawah garis kemiskinan, oleh sebab itu maka, BRI Cabang Situbondo harus ikut andil dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat Situbondo”. (Wawancara Tgl. 3 Desember 2017)

Dari hasil wawancara diatas, tergambar bahwa BRI Situbondo mempunyai andil yang cukup besar dalam pengentasan dan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hal ini juga di sampaikan oleh Nurhamdi selaku Asisten Manajer Buisness Mikro (AMBM) BRI Kantor Cabang Situbondo bahwa :

“ Ya...Alhamdulillah BRI Unit sekantor cabang Situbondo, sudah merealisasikan program pemerintah dalam hal penyaluran KUR yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat atau membantu masyarakat dalam hal pemberian modal untuk usaha para pelaku usaha kecil di Kabupaten Situbondo. Dan sampai sekarang sudah tersalurkan kurang lebih 30 Milyar Rupiah, yang tersebar di 14 BRI Unit kantor cabang Situbondo. “(Wawancara Tgl 5 Januari 2015)

C. Realisasi KUR di BRI Situbondo

Pemberdayaan masyarakat miskin di Kabupaten Situbondo dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Situbondo melalui program KUR pada tahun 2014 sebesar Rp.98,2 Milyard terdiri dari 11.490 debitur dan pada tahun 2015 sebesar Rp. 95,7 Milyard yang terdiri dari 6.239 debitur. Baik diperkotaan hingga pedesaan. Seperti terlihat pada tabel jumlah debitur atau nasabah KUR pada tabel dibawah ini;

Tabel 4.4. Daftar Realisasi KUR di BRI Kanca Situbondo



DAFTAR REALISASI KUR

(000)

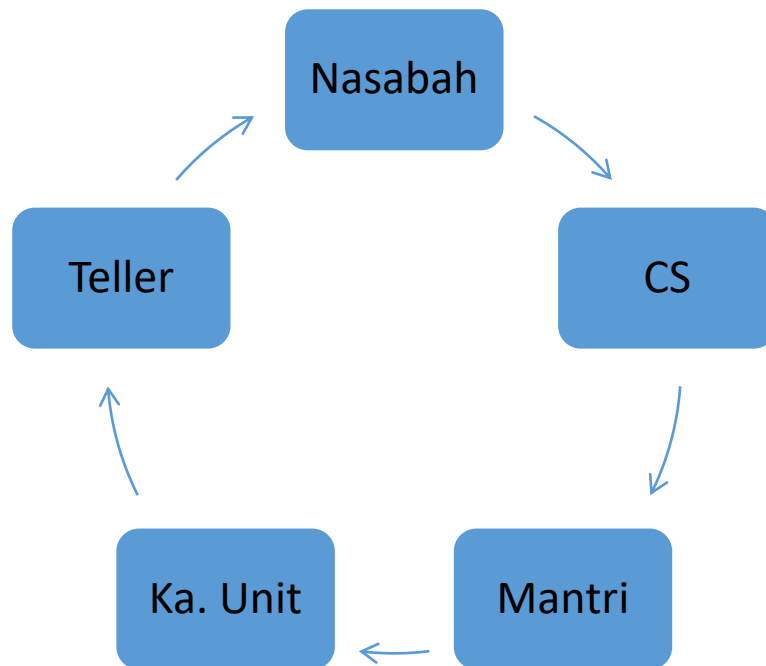
NO	NAMA UNIT	TAHUN		MANTRI		NPL 2015		
		2014		2015				
		RP	ORANG	RP	ORANG	KUR	RP	%
1	SITUBONDO 1	7,479,374	1,178	5,968,739	680	3	51,425	0.86
2	PANJI	4,416,187	573	3,613,007	314	1	45,251	1.25
3	MANGARAN	2,215,404	360	2,653,057	345	1	43,575	1.64
4	KAPONGAN	4,985,026	607	3,994,720	355	2	64,255	1.61
5	JANGKAR	3,992,988	460	3,791,138	315	1	45,247	1.19
6	ASEMBAGUS	7,467,548	826	5,416,816	395	3	65,475	1.21
7	BANYUPUTIH	5,082,122	640	4,780,701	477	3	12,250	0.26
8	PANARUKAN	4,463,112	692	3,563,987	276	2	9,425	0.26
9	SUMBERKOLAK	5,961,043	883	4,903,591	464	3	12,452	0.25
10	MLANDINGAN	4,046,400	524	3,462,684	298	1	42,500	1.23
11	SUBOH	7,528,756	1,176	5,950,025	504	5	64,725	1.09
12	BESUKI 1	7,151,329	1,002	4,812,728	448	4	19,852	0.41
13	BESUKI 2	8,025,370	1,149	7,381,523	479	4	9,242	0.13
14	SITUBONDO 2	8,204,216	1,122	6,965,226	587	3	6,624	0.10
15	CABANG SITUBO	17,250,450	298	28,475,250	302	3	125,250	0.44
	JUMLAH	98,269,325	11,490	95,733,192	6,239	39	617,548	0.65

Sumber :Bagian Administrasi Kredit (ADK) BRI Cabang Situbondo, Januari 2016.

Sejatinnya pemberian program Kredit Usaha Rakyat Oleh BRI bisa berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan berbanding lurus dengan kesejahteraan di Kabupaten Situbondo, sehingga bisa membantu pemerintah Kabupaten keluar dari zona Daerah Miskin dan tertinggal di Propinsi Jawa Timur pada khususnya dan Indonesia secara global.

Ada Beberapa ciri perwujudan pemberdayaan masyarakat miskin melalui program pemberian kredit usaha rakyat pada Bank Rakyat Indonesia cabang Situbondo adalah dari Omzetnya, pertambahan aset dan bagaimana pembayaran anggurannya. Penulis akan menjelaskan alur pemberian kredit KUR seperti di bawah ini:

Gambar. 4.2. Alur Pengajuan KUR di BRI Situbondo



Sumber: Buku Pedoman Pemberian Kredit (PPK) BRI, data diolah 2017

Begitu juga disampaikan oleh Asisten Manajer Pemasaran Kredit (AMPK) BRI Cabang Situbondo Kusno Warsito bahwa :

.....“ secara geografis masyarakat Situbondo terletak di daerah pesisir di jalur pantura dan daya saing yang sangat rendah serta, masyarakat yang tidak kreatif dan cenderung konsumtif, sehingga untuk menjaga keamanan kredit supaya tidak timbul NPL/macet, maka petugas Bank Account Oficier (AO) harus melakukan pendekatan-pendekatan secara intensif dan membina hubungan kekeluargaan terhadap debitur Acount keloannya masing-masing”. (Wawancara tgl 12 Januari 2016).

Tahapan dan tatacara pengajuan kredit dilakukan oleh calon debitur yang menghadap CS (Custumer Servis) ; kedua, setelah semua kelengkapan berkas sudah sempurna diserahkan kepada Ka. Unit; dari Ka. Unit didisposisi ke mantri untuk dilakukan survey dan untuk menentukan layak dan tidaknya untuk mendapatkan kredit.

Setelah melakukan survey , akan menghasilkan dua opsi. Yang pertama apabila dinilai layak maka mantri mengusulkan jumlah kredit dan jangka waktu pembayaran kepada Ka. Unit. Dan akan diserahkan kembali ke CS apabila disetujui oleh ka. Unit. Kemudian CS menghubungi calon Debitur untuk menandatangani perjanjian kredit.

Opsi yang kedua adalah penilaian tidak layak. Berkas akan dikembalikan kepada Ka. Unit, kemudian dari Ka. Unit dikembalikan lagi ke CS (customer Servis). Dan langkah yang terakhir Customer Servis akan mengembalikan calon Debitur.

Pemberdayaan dan Pembinaan kepada Debitur

Salah satu tugas pokok Bank disamping menyalurkan kredit, juga sebagai fasilitator, motifvator dan melakukan pembinaan terhadap Debitur. Berdasarkan Buku pedoman penyaluran Kredit Bank BRI bahwa seorang mantri atau AO (Account Officier) sebagai penanggung jawab terhadap penyaluran kredit maximal dilakukan minimal setiap tiga bulan sekali. (PPK BRI : 2010). Di kantor Cabang BRI Situbondo ada delapan puluh sembilan karyawan yang bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap debitur. Beberapa langkah yang di lakukan BRI dalam melakukan pembinaan terhadap debitur adalah;

Bekerja Sama Dengan BLK (Balai Latihan Kerja) Kabupaten Situbondo

Kerjasama yang dilakukan dengan BLK ini berjalan dua bulan sekali, yang dikemas dalam bentuk pemberian penyuluhan terhadap debitur pasca menerima kredit. Yang berisi materi entrepreneur dan potensi bisnis di Kabupaten Situbondo. Memberikan kemudahan dalam memasarkan produk andalan debitur ke antar kota, antar pulau bahkan ada produk yang di ekspor seperti kerajinan laut.

Bekerja Sama dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian

BRI dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian menjalin kerjasama dalam memasarkan produk debitur BRI Situbondo dengan menggelar pameran dalam skala kabupaten bahkan tingkat Propinsi Jawa Timur.

Bekerja sama Dengan Dinas Koperasi dan UKM

Kerjasama ini dilakukan dua tahap yakni; (1) Calon Debitur yang merupakan binaan Dinas Koperasi dan UKM direkomendasikan kepada pihak BRI Situbondo untuk mendapatkan kredit usaha Rakyat (KUR) (2) Pasca menerima kredit usaha rakyat (KUR) diadakan pembinaan bersama antara BRI dan Dinas Koperasi. Dengan cara mendatangi tempat usaha debitur atau diadakan pertemuan rutin di Dinas Koperasi. Dimana yang menjadi nara sumber adalah petugas dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Situbondo, pegawai Dinas Koperasi dan pelaku usaha yang telah sukses untuk menjadi inspisai dan motifator bagi pemula usaha yang telah diberi kredit KUR oleh BRI.

Bekerja Sama Dengan Bank Indonesia Jember

Salah satu bentuk kerjasama adalah mengikut sertakan pelatihan dan pemeran yang diadakan oleh Bank Indonesia Jember, baik yang diadakan di Situbondo, Jember ataupun di Banyuwangi.

Pembinaan mutlak dilakukan petugas Bank BRI seperti mantri dan AO karena diharapkan adanya peningkatan sumber daya manusia yang miliki oleh debitur, yang awalnya kurang berdikari di harapkan mempunyai jiwa entrepreneurship. Hal ini juga disampaikan oleh Soesilo selaku pemimpin Cabang BRI Situbondo bahwa :

“ kewajiban seorang penyalur kredit disamping merealisasikan kredit kepada pengusaha tetapi juga harus melakukan on the spot atau turun langsung, untuk melihat perkembangan usaha debitur yang telah diberikan kredit, minimal tiga bulan sekali untuk menjaga agar supaya kredit yang disalurkan aman/lancar dan digunakan sesuai dengan segmen usaha yang dibiayai. (Wawancara tgl 8 Desember 2015).

Memang seharusnya ada pembinaan rutin yang harus dilakukan oleh petugas Bank BRI, karena naluri manusia tanpa ada pembinaan atau ikatan antara pemilik modal dan pelaku usaha, maka penggunaan keuangan bisa saja tidak sesuai dengan rencana semula yaitu untuk pengembangan usaha.

Hal senada juga disampaikan oleh Asisten Manajer Bisnis Mikro (AMBM) BRI Situbondo, Nurhamdi bahwa :

“ kredit itu tidak hanya disalurkan atau dicairkan begitu saja karena masyarakat Situbondo ditinjau dari kemampuan mengelola keuangan masih sangat rendah karena rendahnya tingkat pendidikan, sehingga berpotensi untuk menyalahgunakan keuangan yang diterima dari BRI.maka perlu bagi petugas BRI untuk selalu mengadakan pembinaan. (Wawancara Tgl 9 Januari 2016).

Ada pengaruh yang sangat signifikan antara tingkat pendidikan dengan kemampuan mengelola usaha dan memanej keuangan. Maka petugas BRI harus selalu rutin dan inten melakukan pembinaan dalam membantu pengelolaan keuangan Nasabah, agar tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat cepat tercapai dan ada penurunan tingkat kemiskinan. Berikut adalah skema bagaimana pembinaan dan pendampingan yang dilaksanakan oleh mantri BRI Unit;

Membina hubungan kekeluargaan dengan debitur adalah salah satu cara pembinaan terhadap debitur, karena dengan cara tersebut lebih terbuka terhadap masalah-maslah yang dihadapi oleh debitur untuk pengeloaan usaha atau memanej keuangan usaha.



Monitoring dan Pendampingan BRI Situbondo Kepada Penerima KUR

Debitur penerima KUR pada PT. Persero Bank Rakyat Indonesia Situbondo memerlukan pendampingan dari petugas KUR BRI Situbondo baik itu dari mantri unit atau Account Officier (AO) cabang, sehingga nantinya akan berdampak positif terhadap pembayaran angsuran Kredit Usaha rakyat dan meminimalkan angka kredit macet atau Noun Performing Loan (NPL).

Monitoring pinjaman merupakan suatu upaya terpadu meliputi dua aspek yaitu penilaian atas kinerja kredit dan kinerja usaha debitur dan rencana tindak lanjut untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Pada kenyataannya antara kinerja kredit tidak berbanding lurus dengan kinerja usaha, karena bisa saja terjadi kinerja usaha Debitur baik, namun kinerja kreditnya tidak baik akibat debitur tidak koperatif dan tidak memenuhi kewajibannya tepat pada waktunya. Memperhatikan hal tersebut di atas maka dalam pelaksanaan monitoring kredit harus memperhatikan kedua aspek tersebut di atas.

Obyek monitoring kinerja usaha debitur adalah angka-angka dan rasio-rasio dalam laporan keuangan debitur; obyek monitoring kinerja kreditnya adalah angka/informasi kredit dari perbankan, sedangkan obyek monitoring kinerja debitur dilakukan dengan melihat perkembangan dan prospek usaha.

Monitoring yang dilakukan dengan benar akan berfungsi sebagai alat deteksi dini (early warning sign) terhadap permasalahan yang mungkin akan timbul dalam perusahaan debitur dan segera mencari rencana tindak lanjut penyelesaian masalah, sehingga pada akhirnya dapat menghindari atau memperkecil resiko tidak terbayarnya pinjaman kepada bank. Monitoring secara pasif dan administratif bagi debitur pada dasarnya merupakan pembinaan yang dilakukan melalui pengamatan terhadap informasi dan catatan-catatan yang ada dari laporan keuangan debitur, maupun informasi dari pihak ketiga (akuntan, appraisal, media massa).

Fungsi informasi dari media massa juga sangat penting, sebagai contoh adanya informasi tentang kebijakan pemerintah yang memberikan kemudahan dalam usaha tertentu misalnya kemudahan pendirian pabrik sepatu untuk penanaman modal asing di Indonesia dimana produknya direncanakan akan dipasarkan dalam negeri. Informasi ini untuk jangka panjang akan berpengaruh terhadap harga dan kualitas usaha home industri oleh debitur yang memproduksi sepatu, karena dengan kondisi peralatan yang sederhana, maka sepatu produksi home industri tersebut kemungkinan tidak akan dapat bersaing dengan produk pabrikan. Apabila usaha home industri tersebut dibiayai oleh BRI, maka informasi tersebut membawa dampak yang negatif bagi bank BRI.

Dalam konteks ini, monitoring Debitur oleh BRI Situbondo dilakukan untuk melakukan penilaian terhadap kualitas kredit Debitur KUR, serta untuk mengambil langkah-langkah antisipatif yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang timbul, dimana permasalahan kredit yang terdapat pada masing-masing debitur selalu berbeda sehingga penanganannyapun tidak sama sesuai dengan situasi dan kondisi debitur tersebut.

Parameter – parameter yang dapat dianalisa dan dijadikan tanda-tanda peringatan dini dalam melakukan monitoring individual secara pasif antara lain : (1) Pada Neraca Periode penagihan piutang mulai melambat demikian juga dengan periode perputaran persediaan atau adanya peningkatan yang tajam pada pos piutang dan persediaan. Piutang terkonsentrasi pada pihak tertentu atau debitur bersifat kompromi pada piutang sehingga penagihan memakan waktu yang lama. Terjadi kenaikan piutang kepada karyawan/direksi secara cepat atau timbul piutang afiliasi (sebelumnya tidak ada). (2) Terjadi kenaikan aktiva tetap secara cepat, Timbul hutang jangka pendek/jangka panjang yang sebelumnya tidak muncul dalam neraca. Terjadi kenaikan hutang kepada pihak lain. (3) Rugi / Laba Debitur Terjadi penurunan penjualan dan laba kotor. Terjadi peningkatan biaya-biaya yang meningkat drastis tidak proporsional yang berakibat penurunan profit margin. Terjadi pengambilan/prive tanpa persetujuan bank (terutama jika dalam syarat kredit dilarang). Terjadi biaya penghapusan piutang tidak tertagih atau persediaan rusak dalam jumlah besar. Usaha mulai merugi

Monitoring secara aktif bagi debitur. Dilakukan dengan melaksanakan pembinaan secara aktif melalui pendampingan untuk memantau kualitas dan prospek usaha Debitur meliputi : **Manajemen**, Apakah ada perubahan sikap pengurus/pemilik perusahaan terhadap pihak bank terutama itikad untuk bekerjasama, misalnya pejabat bank kesulitan atau tidak untuk menemui pengurus/pemilik perusahaan.

Apakah terjadi perpecahan pengurus, sehingga pengurus saling melempar tanggung jawab termasuk tanggung jawab pemenuhan kewajiban kepada bank. Apakah fungsi pengawasan dalam perusahaan tidak berjalan pengurus/pemilik perusahaan terlalu ekspansif dalam pengembangan usahanya tanpa didukung oleh pengalaman yang cukup. Apakah penempatan tenaga kerja telah didasarkan pada keahlian personal, dan bukan atas dasar hubungan kekeluargaan. Apakah terjadi permasalahan perburuan diperusahaan debitur.

Kebijakan Pemerintah terhadap Kualitas Kredit, Adanya peraturan pemerintah pusat/daerah yang mengatur tata niaga produk yang dihasilkan oleh debitur, dengan perubahan peraturan tersebut dapat berakibat positif/negatif terhadap



usaha debitur, misalnya adanya izin baru dari Pemda setempat untuk pendirian pasar grossir ritel di daerah tempat usaha debitur (pedagang kelontongan) akan mengancam kelangsungan usaha debitur.

Monitoring kualitas kredit dilakukan untuk mengetahui sedini mungkin kinerja kredit debitur. Hal ini perlu dilakukan mengingat kualitas usaha debitur yang baik tidak menjamin akan menghasilkan kualitas kredit yang baik, karena ketertiban pembayaran kewajiban (bunga dan pokok) dipengaruhi oleh aspek karakter.

Kualitas kredit debitur KUR juga dapat dilihat dari data aktifitas rekening debitur di bank BRI Situbondo, yang datanya dapat diperoleh dari debitur debitur. Monitoring terhadap kualitas kredit ini diperlukan untuk mengetahui: (1) Ketertiban debitur dalam pemenuhan kewajiban pembayaran pokok dan atau bunga kredit. (2) Apakah tujuan penggunaan kredit telah sesuai dengan tujuan penggunaan semula, apabila KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang diberikan digunakan untuk pembiayaan investasi aktiva tetap, maka modal kerja bersih /Net Working Capital (NWC) akan turun dan pada akhirnya cash flow debitur akan terganggu dan dapat mempengaruhi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya. (3) Apakah kredit KUR yang diberikan telah digunakan sesuai untuk usaha yang dibiayai sesuai perjanjian kredit, dan bukan untuk usaha lainnya. (4) Apakah struktur, type dan syarat kredit yang diberikan telah cocok dan sesuai dengan karakteristik sifat bisnis debitur. Apabila tidak sesuai maka harus diantisipasi dengan melakukan tindak lanjut berupa perubahan type, struktur dan syarat kreditnya. (5) Apakah jumlah plafond kredit yang diberikan telah memadai, sebagai contoh : apabila debitur ingin mengajukan tambahan kreditnya, sementara itu dari data kinerja kreditnya tampak bahwa pemakaian plafond selama ini tidak pernah maksimal, maka data pinjaman yang terekam dalam aktifitas mutasi R/K (Rekening Koran) debitur dapat dipakai sebagai dasar untuk memberitahukan bahwa plafond yang ada masih mengcover, sehingga BRI Situbondo dapat memutuskan belum perlu diajukan tambahan kredit.

D. Pendampingan Pasca Kredit

Pendampingan pada pasca kredit adalah merupakan pembinaan lanjutan yang pada kegiatan pembinaan dan pengembangan bagi debitur. Pendampingan pasca kredit ini jika dilihat dari sisi bank adalah sebagai sarana untuk mengadakan pengawasan terhadap pengembalian kredit. Namun dari sisi BRI adalah selain suatu kegiatan monitoring terhadap hasil pendampingan itu sendiri juga sebagai sarana apakah BRI Situbondo berhasil/tidak dalam menghantar atau menghubungkan UMKM sebagai Debitur/ nasabah yang handal.

Dalam hal pembinaan lanjutan, bank dapat menjalin kerjasama dengan BRI Situbondo untuk melakukan pemantauan penggunaan kredit, penagihan angsuran, pengumpulan tabungan serta pembinaan–pembinaan lainnya sehubungan dengan permasalahan keuangan lainnya. Namun apabila bank tidak menghendaki kerjasama dengan BRI Situbondo untuk melakukan hal–hal tersebut diatas, maka BRI Situbondo tetap melakukan kegiatan pendampingan kepada debitur sampai jangka waktu kredit KUR tersebut lunas.

Sebagai kesimpulan tujuan pembinaan dan pendampingan kepada debitur yang dilaksanakan oleh BRI Situbondo merupakan tanggung jawab profesi dan moral terutama dalam pengembangan debitur yaitu memastikan pengembalian kredit tepat waktu yang pada akhirnya berdampak kepada: Terciptanya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya debitur, Terwujudnya debitur menjadi usaha yang efisien, sehat dan memiliki pertumbuhan yang tinggi, sehingga mampu menjadi kekuatan ekonomi rakyat dan memberikan sumbangan yang besar bagi pembangunan ekonomi nasional, Debitur yang dapat berperan maksimal dalam penyerapan tenaga kerja dan sumber pendapatan, Terciptanya bentuk–bentuk kerjasama yang dapat memperkuat kedudukan UMKM dalam kompetisi di tingkat nasional dan internasional.

E. Kendala–Kendala Atau Hambatan Dalam Mengimplementasikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Situbondo

Dalam setiap perumusan kebijakan apakah menyangkut proram maupunkegiatan–kegiatan selalu diiringi dengan suatu tindakan pelaksanaan atau implementasi. Betapa pun baiknya suatu kebijakan tanpa implementasi maka tidakakan banyak berarti. Implementasi kebijakan bukanlah sekedar bersangkut pautdengan mekanisme penjabaran keputusan–keputusan politik ke dalam prosedurrutin lewat saluran–saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkutmasalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan (Grindle dalam Wahab, 1990:59).

Oleh sebab itu, tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Ini menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara perumusankebijakan dengan implementasi kebijakan dalam arti walaupun perumusan dilakukan dengan sempurna namun apabila proses implementasi tidak bekerja sesuai persyaratan, maka kebijakan yang semula baik akan menjadi jelek begitu pula sebaliknya.

Dalam kaitan ini, seperti dikemukakan oleh Wahab (1990:51),menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkanjauh lebih



penting daripada pembuatan kebijaksanaan. Kebijaksanaan hanyasekedar impian atau rencana bagus yang tersimpan dalam arsip kalau tidakmampu diimplementasikan.Salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam memberdayakanusaha kecil khususnya dalam akses permodalan adalah melalui program Kredit Usaha Rakyat.

Pada dasarnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan suatukredit atau pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada usaha mikro, kecil,menengah, dan koperasi di bidang usaha produktif dan layak namun belum *bankable* yang sebagian dijamin oleh perusahaan penjamin. Program KUR lahir sebagai respon dari Instruksi Presiden No. 6 Tahun2007 Tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah khususnya bidang Reformasi Sektor Keuangan. Inpres tersebut ditindak lanjuti dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama (*Memorandum of Understanding/MoU*) antara Pemerintah, Lembaga Penjaminan, dan Perbankan pada tanggal 9 Oktober 2007 sebagaimana kemudian diubah dengan *addendum* pada tanggal 14 Mei 2008. Tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada debitur dan Koperasi atau yang lebih populer dengan istilah Program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Hasil observasi dari lapangan yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa kendala atau hambatan dalam penyaluran kredit usaha rakyat terletak pada regulasi dan sistem yang ada di manajemen BRI.

Sudah menjadi fenomena di kalangan kepala BRI Unit karena tugas yang menumpuk, akibat perubahan sistem dari manual ke on-line, dimana pencairan bisa dibayarkan setelah menggunakan password dari Kepala Unit BRI. Sehingga waktu *on the spot* atau kunjungan ke debitur untuk melakukan pembinaan menjadi sangat terbatas.

Melalui program KUR, pemerintah mengharapkan adanya akselerasi/percepatan pengembangan kegiatan perekonomian terutama di sektor riil, dalam rangka penanggulangan atau pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja (Djoko Retnadi. 2008). Dalam pelaksanaan atau implementasi program KUR, terdapat 3 (tiga)pilar penting yaitu: pemerintah yang berfungsi membantu dan mendukung pelaksanaan pemberian kredit berikut penjaminan kredit, Lembaga Penjaminanyang bertindak selaku penjamin atas kredit/pembiayaan yang disalurkan oleh Perbankan, dan Perbankan sebagai penerima jamianan berfungsi menyalurkan kredit kepada Debitur dengan menggunakan dana internal masingmasing.

Mengacu pada landasan hukum KUR tersebut di atas, skema program KUR memiliki perbedaan baik dibandingkan dengan program pemberdayaan/bantuan

kepada masyarakat maupun dengan skema kredit programlain yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah. KUR merupakan Kredit Modal Kerja atau Kredit Investasi yang dibiayai sepenuhnya dari dana perbankan, diberikan kepada Debitur baru dengan plafon kredit maksimal Rp.500 juta.

Usaha yang dibiayai merupakan usaha produktif yang *feasible* namun belum *bankable*. Suku bunga ditetapkan maksimal 24 % efektif per tahun untukplafon kredit sampai dengan Rp 5 juta dan maksimal 16 % efektif per tahun untukplafon kredit di atas Rp 5–500 juta. Secara nasional, penyaluran KUR yang dilakukan oleh 6 (enam) bank pelaksana KUR sampai dengan akhir Desember 2015 tercatat sebesar Rp.12.624,2 miliar untuk 1.671.668 nasabah. Secara sektoral terdapat dua sektorekonomi yang menyerap program KUR terbesar yaitu sektor perdagangan, hotel,dan restoran dengan porsi mencapai 58,5 % atau Rp. 7.388 miliar dan sektor pertanian dengan porsi 21,9 % atau 2.769,3 miliar dari total KUR yang disalurkan.

Berbicara mengenai pengembangan usaha kecil, hal tersebut tidak terlepas dari segi permodalan (kredit). Dimana melalui program KUR pengusaha kecil dapat memperoleh akses kredit yang dapat digunakan sebagai modal untuk memulai dan membuka usaha baru yang produktif. Selain itu juga, modal atau kredit akan meningkatkan gairah masyarakat dalam menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha melalui kreatifitas dan inisiatif sendiri untuk meningkatkan taraf hidupnya atau dengan kata lain modal/kredit tersebut dapat digunakan oleh pengusaha kecil untuk memperluas dan mengembangkan usahanya sehingga dapat meningkatkan pendapatan yang diperoleh oleh pengusaha kecil tersebut.

Pada lingkungan masyarakat miskin di Kabupaten Situbondo, banyak terdapat rentenir, atau pengijon yang memberikan bantuan permodalan kepada para pengusaha kecil dengan menggunakan jaminan berupa harta benda yang dimiliki oleh para pengusaha kecil. Hal ini memang dapat membantu permasalahan keuangan yang dihadapi para pengusaha kecil, tetapi hal tersebut hanya dapat menyelesaikan secaras ementara dan setelah itu para pengusaha kecil akan mendapatkan masalah baru yaitu pengembalian pinjaman yang disertai dengan tingkat bunga yang tinggiyaitu 5 % sampai dengan 15 % per bulan.

Bagi pengusaha kecil yang terlambat membayar utang yang diberikan oleh rentenir tersebut, juga akan dikenakan denda dengan tingkat suku bunga yang tinggi. Oleh sebab itu, pengusaha kecil justru akan mengalami kesulitan dalam pengembangan usahanya serta pengembalian pinjaman kepada pihak pemberi pinjaman yaitu rentenir atau ijon. Sehingga kredit yang diberikan oleh pemerintah melalui program Kredit Usaha Rakyat ini, diharapkan sesuai dengan kemampuan pengusaha kecil.



F. Kesimpulan

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia Cabang Situbondo dapat mewujudkan pemberdayaan masyarakat miskin melalui Kredit Usaha Rakyat Bank Rakyat Indonesia di Kabupaten Situbondo Jawa Timur meliputi penyaluran kredit dan pembinaan terhadap debitur. Program pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI di Situbondo cukup besar, pemberdayaan masyarakat miskin melalui pendekatan ekonomi, mampu mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Situbondo dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara makro dan merata. dalam memahami pemberdayaan masyarakat miskin melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), sebagian besar masyarakat menganggap dana KUR adalah hadiah atau hibah dari pemerintah. KUR BUKAN merupakan dana hibah dari pemerintah kepada masyarakat. Sesuai dengan pengertian KUR sebelumnya disebutkan bahwa KUR adalah kredit/pembiayaan kepada UMKMK (Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi), sehingga debitur wajib mengembalikan dana pinjaman KUR tersebut kepada Bank BRI Situbondo pemberi dana KUR. Perlu dipahami bahwa uang KUR bukanlah dana dari pemerintah melainkan dana dari pihak perbankan, sehingga disalurkan melalui mekanisme perbankan dan juga harus dikembalikan sesuai ketentuan dari pihak perbankan. Sumber dana penyaluran KUR adalah 100% (seratus persen) bersumber dari dana Bank Pelaksana yang dihimpun dari dana masyarakat berupa giro, tabungan dan deposito.

Pembinaan dan pendampingan BRI Cabang Situbondo terhadap pemberdayaan masyarakat miskin melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) di kabupaten Situbondo. Salah satu indikator dan tugas pokok Bank disamping menyalurkan kredit, juga sebagai fasilitator, motivator dan melakukan pembinaan terhadap Debitur. Berdasarkan Buku pedoman penyaluran Kredit Bank BRI bahwa seorang mantri atau Account Oficer (AO) sebagai penanggung jawab terhadap penyaluran kredit maksimal dilakukan minimal setiap tiga bulan sekali. Pembinaan mutlak dilakukan petugas Bank BRI seperti mantri dan Account oficer (AO) karena diharapkan Adanya peningkatan sumber daya manusia yang miliki oleh debitur, yang awalnya kurang berdaya di harapkan mempunyai jiwa entrepreneurship. Mempertimbangkan kebijakan yang telah dilakukan selama ini agar ditinjau ulang, menyeimbangkan target yang harus dicapai dengan kemampuan mantri dalam mengelola account. Sehingga mempunyai waktu untuk melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap para debitur, diharapkan usaha debitur lebih berkembang dengan menanamkan jiwa entrepreneurship sehingga kualitas kreditnya juga menjadi sehat.

Kendala-kendala atau hambatan dalam mengimplementasikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Situbondo, terletak pada regulasi dan sistem yang ada di manajemen BRI. karena besarnya target yang harus disalurkan kepada setiap mantri terlalu besar, sehingga waktu untuk pembinaan kepada debitur sangat terbatas, sehingga inilah yang menyebabkan kondisi kredit menjadi tidak sehat atau dikenal kredit macet/Non Performing Loan (NPL)

Daftar Pustaka

- Abdullah, Amin dkk. *Meretas Jalan Baru Ekonomi Muhammadiyah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.
- Abbeduto, Leonard. 2004. *Taking Sides: Clashing Views on Controversial Issues in Educational Psychology* Third Edition. McGraw-Hill, Dushkin.
- Adi, Isbandi Rukminto. 2002. *Pemikiran-Pemikiran Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta.: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Adedokun, O.M. C.W, Adeyamo, and E.O. Olorunsula. 2010. *The Impact of Communication on Community Development. J Communication*, 1(2): 101-105.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian "Suatu Pendekatan Praktik"*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cetakan VIII, 2007.
- Ahmed, Shahid (Ed.). 2002. *Asia-Pacific Development Journal*. Vol. 9, No. 2, December. UN: Economic and Social Commission for Asia and the Pacific.
- Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*, Terj. Muhammad Sodik dan Imam Muttaqin (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2003)
- Attali, Jacques. 1999. *Milenium Ketiga*. Terjemahan oleh Emmy Nor Hariati. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ala, Andre Bayo, *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Arikunto, Suharsim, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1989.
- Azwar, Saiffudin, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.
- Bappenas, *Pembangunan Dalam Angka*, Jakarta, 1998.



- B. Guy Peters, *Comparative Politics: Theory and Methods* ; New York: New York University Press, 1998.
- Bartlett, Andrew. 2004. *Entry Points for Empowerment. A report*. Bangladesh: the UK Government's Department for International Development (DFID).
- Bonfiglioli, Angelo. 2003. *Empowering the Poor Local Governance for Poverty Reduction*. New York: United Nations Capital Development Fund.
- Badruzzaman, Abad. Teologi Kaum Tertindas (Kajian Tematik Ayat-ayat Kaum Mustadh'afin dengan Pendekatan Keindonesiaan). Yogyakarta: P3M STAIN Tulung Agung, kerjasama dengan Pustaka Pelajar, 2007.
- Barker, George R. 1997. Social capital and policy development dalam david robinson, social capital and development. Wellington: institut of policy studies.
- Bashith, Abdul. Ekonomi Kemasyarakatan, Visi dan Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Lemah. Malang: UIN – Malik Press, 2012.
- Bungin, Burhan. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- BPS. "Tahun 2013, Pengangguran di Indonesia Melonjak". dalam <http://ekonomi.kompasiana.com/wirusaha/2013/11/07/tahun-2013-pengangguran-di-indonesia-melonjak-605967.html>, diakses pada 25 Mei 2014.
- Combs & Ahmed. 1973. Memerangi Kemiskinan di Pedesaan Melalui Pendidikan Non-formal. Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial.
- Reid, J. Norman. 2002. *Poverty, Race and Community in Rural Places: The Empowerment Approach*. Prepared for presentation at the 2002 International Community Development Society Conference, Cleveland, Mississippi, July 23.
- Coudouel, Aline, Anis A. Dami, Stefano Paternostro. 2006. *Poverty and Social Impact Analysis of Reforms. Lessons and Examples from Implementation*. Washington DC: The International Bank for Reconstruction and Development/World Bank.
- Chalid, Pheni. 2005. Otonomi Daerah Masalah, Pemberdayaan dan Konflik. Penebar Swadaya. Cetakan pertama. Jakarta.
- Chambers, R. 1985. Rural Development : Putting The Last First. London ; New York.